PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO SUMITRO**
2. Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **516835**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.580.060.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/90 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 281.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BG7 /SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2,4 AT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 283.250.000

D. SURAT BERHARGA — Rp. ----

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**106.760.722**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.251.070.722**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**236.209.709**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.014.861.013**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.